



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT
BIRO UMUM
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat**

**PENGUMUMAN SELEKSI UMUM DENGAN
PASCAKUALIFIKASI**

Nomor: PENG-02/SET.M.EKON.ULP.POKJA/TAS-PERPAJAKAN-SPNBE-ULANG/01/2018

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Seleksi Umum dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perorangan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	: Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Senior Bidang Perpajakan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun Anggaran 2018
Lingkup pekerjaan	: Tenaga Ahli Senior Bidang Perpajakan
Nilai total HPS	: Rp562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Sumber pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2018
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 1 Februari s.d. 31 Oktober 2018 (9 Bulan Kalender)

2. Persyaratan Peserta

1. Pendidikan Minimal S1 (diutamakan S2) dari institusi terakreditasi baik dari dalam maupun luar negeri pada bidang Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.
2. Memiliki Sertifikat Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) / Brevet B dan C.
3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan atau akademis khusus di bidang perpajakan minimal 10 (sepuluh) tahun.
4. Memiliki pengalaman dalam membuat telaah dan kajian atas kebijakan perpajakan di Indonesia dan/atau studi kasus di luar negeri.
5. Diutamakan memiliki pengalaman kajian terkait regulasi perpajakan atau sejenis yang berhubungan dengan Ekonomi Digital.
6. Diutamakan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih (dibuktikan dengan score TOEFL: 550 atau IELTS 6.5).
7. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
8. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta (melampirkan surat pernyataan bermaterai).
9. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

10. Memiliki bukti potong pajak atas penghasilan tertinggi pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan.
 11. Bersedia mengalokasikan waktu minimal 2 (dua) hari dalam 5 (lima) hari kerja terhitung bulan Februari-Oktober 2018 yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan.
3. **Pendaftaran dan Pengambilan (*download*) Dokumen Pengadaan:**
Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengambil Dokumen Pengadaan dengan mengunduh melalui aplikasi SPSE (www.lpse.lkpp.go.id).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 5 Januari 2018
Pokja ULP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian